

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA BALAI DIKLAT KEHUTANAN
MAKASSAR**



OLEH

IRA SEPTA DWIWIBOWO

NIM : 4511013120



Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS '45' MAKASSAR**

2012

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA BALAI DIKLAT KEHUTANAN
MAKASSAR**



OLEH
IRA SEPTA DWIWIBOWO
NIM : 4511013120



Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS '45' MAKASSAR**

2012

SKRIPSI

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA BALAI DIKLAT KEHUTANAN
MAKASSAR**

Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

BOSOWA



Oleh:

IRA SEPTA DWIWIBOWO

NIM : 4511013120

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA BALAI DIKLAT
KEHUTANAN MAKASSAR

NAMA MAHASISWA : IRA SEPTA DWIWIBOWO

NOMOR STAMBUK : 45 11 013 120

FAKULTAS : EKONOMI

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI



TELAH DISETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(DARMAWATI, SE., M.Si., Ak.)

(FARIDAH, SE., M.Si., Ak.)

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

KETUA PROGRAM STUDI
AKUNTANSI



(MUHLIS RUSLAN, SE., M.Si.)

(THANWAIN, SE., M.Si.)

Tanggal Pengesahan : 2013

HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Sabtu, 8 Desember 2012

Skripsi Atas Nama : Ira Septa Dwiwibowo

No. Stambuk : 45 11 013 120

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH.
(Rektor Univ. "45" Makassar)

Ketua : Muhlis Ruslan, SE., M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Chahyono, SE., M.Si.

Anggota Penguji : 1. Darmawati, SE., M.Si., Ak.

2. Muhlis Ruslan, SE., M.Si.

3. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes., Ak.

4. Faridah, SE., M.Si., Ak.



Handwritten signatures of the members of the Thesis Examination Panel, corresponding to the names listed on the left. There are four distinct signatures, each followed by a dotted line for a name.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis. Selanjutnya kepada Ibu Darmawati SE, M.Si Ak dan Ibu Faridah SE, M.Si, Ak sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis tunjukkan kepada Bapak Ir. Agus Widoyoko M.Sc sebagai Kepala Balai Diklat Kehutanan Makassar atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor beliau. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Jayadi SE beserta staf bagian Evaluasi dan Pelaporan yang telah memberikan andil sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih penulis juga berikan kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara penulis atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepeuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami hargai demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Desember 2012

Penulis

Ira Septa Dwiwibowo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori	8
2.2 Kerangka Pikir	28
2.3 Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Daerah Penelitian	30
3.2 Metode Pengumpulan Data	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Analisis	31
3.5 Definisi Operasional	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	33
4.2 Deskripsi Data	39
4.3 Analisis Data	59

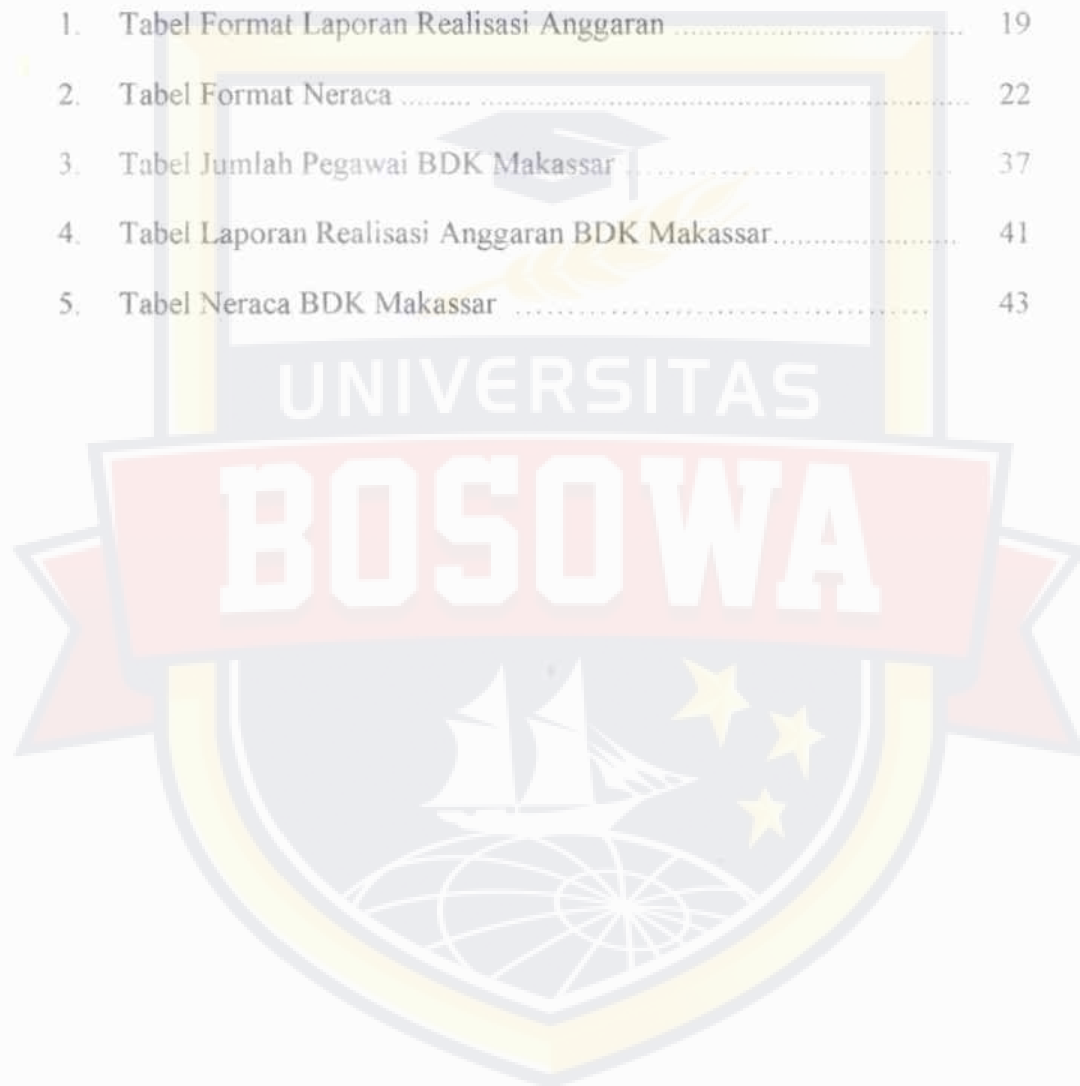
BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67



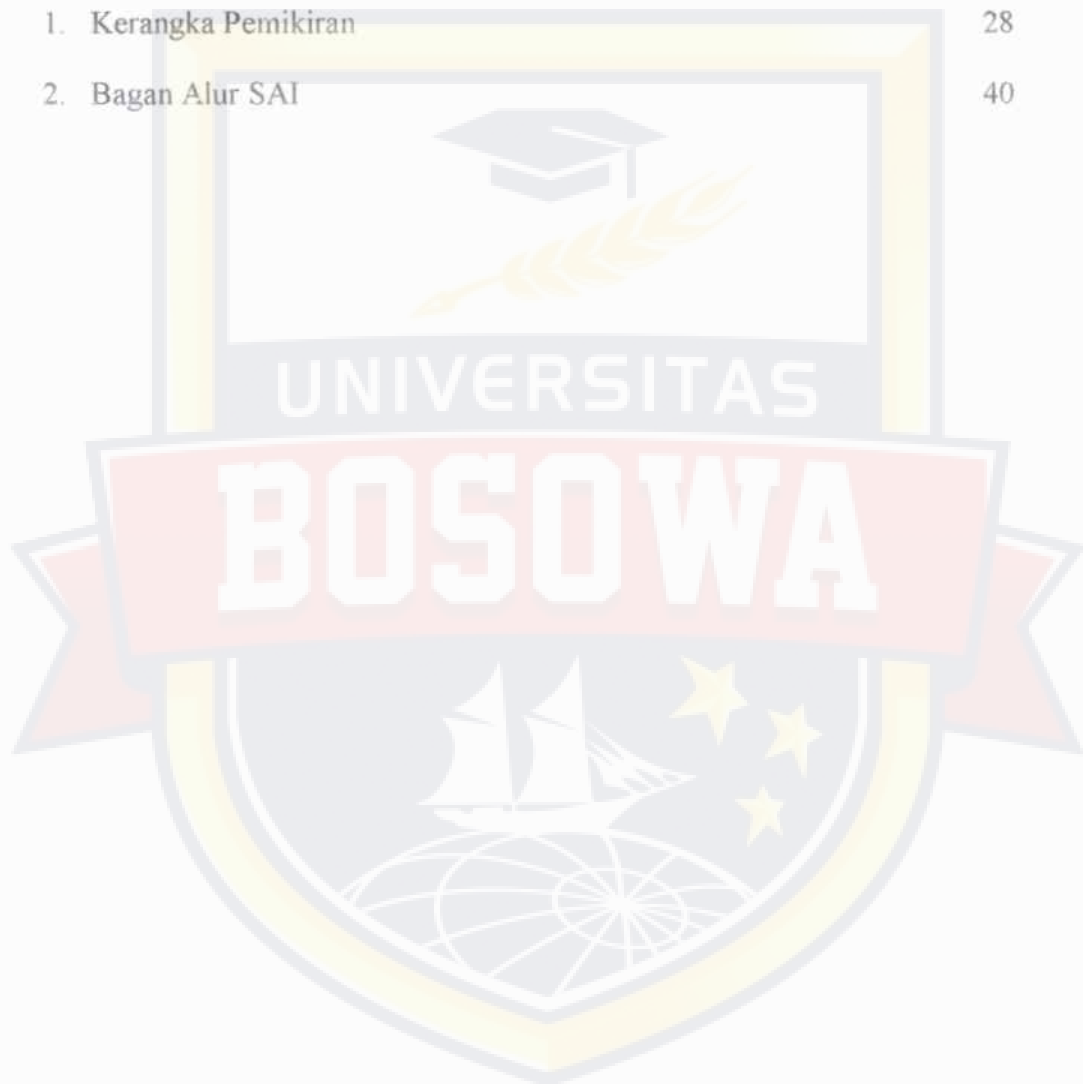
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Format Laporan Realisasi Anggaran	19
2. Tabel Format Neraca	22
3. Tabel Jumlah Pegawai BDK Makassar	37
4. Tabel Laporan Realisasi Anggaran BDK Makassar.....	41
5. Tabel Neraca BDK Makassar	43



DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	28
2. Bagan Alur SAI	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Berita Acara Rekonsiliasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif.

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total, pada hampir semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema utama reformasi total tersebut adalah mewujudkan *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan *good governance*, syaratnya yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum (Mardiasmo, 2002).

Hal ini berdampak pada reformasi akuntansi keuangan dan manajemen keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan dalam akuntansi keuangan juga terkena dampaknya. Selain sebagai alat untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, laporan

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena akuntansi sebagai proses untuk menghasilkan informasi keuangan yang tersedia untuk berbagai pihak sesuai dengan tujuan masing-masing.

Standar Akuntansi Pemerintahan dibuat sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dapat meningkat kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sehingga *good governance* tercapai.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan

kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan apabila penyajiannya dilaksanakan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusunan laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya auditor eksternal, SAP digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*, asalkan terpenuhi tiga elemen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektifitas dan efisiensi anggaran menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena adanya standar, Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal menjadi lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena adanya standar, semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di setiap Satuan Kerja (satker) mampu mengendalikan pelaksanaan anggaran keuangan di kantornya.

Oleh karena itu, dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan jawaban atas adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima

umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keluarnya PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang kemudian memicu munculnya peraturan-peraturan lainnya, diantaranya PMK No. 59 tahun 2005 yang digantikan dengan PMK 171 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Peraturan bpemerintah ini kemudian menjadi acuan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 51 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga (warta bea cukai, 2010)

Standar digunakan untuk menghasilkan suatu laporan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap satker bisa jadi berbeda-beda yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya maka setiap penyajian laporan keuangan pada setiap satker harus mengikuti standar ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya yaitu berupa infrastruktur, karena membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Namun dalam penyajian laporan keuangan, Balai Diklat Kehutanan Makassar sebagai salah satu satker di Kementerian Kehutanan kemungkinan masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun

2010 yaitu "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Dimana salah satu komponen penilaian opini tersebut berasal dari penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Balai Diklat Kehutanan Makassar**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut "apakah satuan kerja Balai Diklat Kehutanan Makassar telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 51 tahun 2008 untuk tahun buku 2010"?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan satker Balai Diklat Kehutanan Makassar tahun buku 2010.
2. Untuk menganalisis perbandingan penyajian laporan keuangan satker Balai Diklat Kehutanan Makassar tahun buku 2010 dibandingkan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008 .

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai penyajian laporan keuangan satuan kerja sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008 pada laporan keuangan Balai Diklat Kehutanan Makassar dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi satuan kerja, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada satuan kerja tingkat pusat.
3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 51 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Di bidang perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Terdapat dua entitas dalam peraturan ini, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan menyusun laporan setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Oleh karena itu Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk

- 1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat kantor wilayah.
- 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) pada tingkat eselon 1.
- 4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat kementerian/lembaga.

Dalam hal pengendalian, maka laporan keuangan wajib dilakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharran Negara (KPPN) setiap bulannya.
- 2) Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- 3) Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1 dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

- 4) Rekonsiliasi tingkat UAPA dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan wajib dilakukan review oleh aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga sebelum diserahkan kepada Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Pimpinan Eselon 1 pada tingkat Eselon 1, Kepala Kantor/Koordinator Wilayah pada tingkat Wilayah, dan Kepala Satuan Kerja pada tingkat Satuan Kerja.

2.1.2 Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Menurut Hadari Nawawi (2001 : 37) "sumber daya manusia adalah orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain." Menurut Susilo (2002 : 3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat menjalankan secara benar program

aplikasi tersebut. Seorang pegawai akan lebih mudah dan cepat mengerti program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer khususnya program *Office*.

2.1.2.2 Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (*hardware*) berupa unit computer atau laptop. Menurut Kenneth dan Jane (2005:18) "perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi". Kenneth dan Jane (2005:10) "perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian intruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem informasi". Perangkat lunak (*software*) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAKPA) dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan satuan kerja dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan keuangan tersebut dibutuhkan.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2.1.3.1 Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan menurut PP 24 tahun 2005 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Secara spesifik menurut Perdirjen Perbendaharaan No 51 Tahun 2008 adalah hasil penggabungan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas dana;
- 4) Pendapatan;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Arus kas.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:10):

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria :

- (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (4) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- (1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas pada saat perolehan.

- o Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja ddalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan

(*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenalkan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi netral dan tidak andal.

2.1.3.4 Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat.
- b. Telah sesuai dengan anggarannya
- c. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ulum (2004:192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar, atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanaatkan surplus anggaran.

Bentuk laporan realisasi anggaran dapat kita lihat pada tabel berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : XXX

KODE LAPORAN : LRAKT
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN : XX
PROG. ID : XXXXXXXXXXXX

No	URAIAN	2010				2009			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
A.1.a	Penerimaan Pajak	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
A.2	HIBAH	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH								
B	BELANJA								
B.1	Rupiah Murni	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Pegawai	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Barang	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Modal	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Pembayaran Bunga Utang	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Subsidi	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Hibah	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Bantuan Sosial	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Lain-Lain	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Pinjaman Luar Negeri	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Pegawai	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Barang	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Belanja Modal	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Pembayaran Bunga Utang	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
	Subsidi	99,999	99,999	99,999	99,99	99,999	99,999	99,999	99,99
B.2									

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Menurut Ulum (2004:213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dan cadangan atas kewajiban jangka panjang.
- c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk neraca disajikan pada tabel berikut:

**SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2XX1 dan 2XX0
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : XXX KODE LAPORAN : NSAIKPS
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN : X
PROG. ID : XXXXXXXXXX

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2XX1	2XX0	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
Kas di Bendahara Pengeluaran	999,999	999,999	999,999	999,999
Kas di Bendahara Penerimaan	999,999	999,999	999,999	999,999
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)	999,999	999,999	999,999	999,999
Piutang Pajak	999,999	999,999	999,999	999,999
Piutang Bukan Pajak	999,999	999,999	999,999	999,999
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	999,999	999,999	999,999	999,999
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka Belanja	999,999	999,999	999,999	999,999
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	999,999	999,999	999,999	999,999

Piutang dari Kegiatan non Operasional BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Investasi Jangka Pendek-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Piutang Lainnya	999,999	999,999	999,999	999,999
Persediaan	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH ASET LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
INVESTASI JANGKA PANJANG	999,999	999,999	999,999	999,999
' Investasi Non Permanen	999,999	999,999	999,999	999,999
' Investasi Non Permanen-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Jumlah Investasi Non Permanen	999,999	999,999	999,999	999,999
INVESTASI PERMANEN	999,999	999,999	999,999	999,999
' Investasi Permanen-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Jumlah Investasi Permanen	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	999,999	999,999	999,999	999,999
ASET TETAP	999,999	999,999	999,999	999,999
Tanah	999,999	999,999	999,999	999,999
Peralatan dan Mesin	999,999	999,999	999,999	999,999
Gedung dan Bangunan	999,999	999,999	999,999	999,999
Tanah, Irigasi dan Jaringan	999,999	999,999	999,999	999,999
Aset Tetap Lainnya	999,999	999,999	999,999	999,999
Konstruksi Dalam Pengerjaan	999,999	999,999	999,999	999,999
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	999,999	999,999	999,999	999,999
Tanah Badan Layanan Umum	999,999	999,999	999,999	999,999
Peralatan dan Mesin BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Gedung dan Bangunan BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Tanah, Irigasi dan Jaringan BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Aset Tetap Lainnya BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH ASET TETAP	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH ASET	999,999	999,999	999,999	999,999
DANA CADANGAN	999,999	999,999	999,999	999,999
' Dana Cadangan	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH DANA CADANGAN	999,999	999,999	999,999	999,999

ASET LAINNYA	999,999	999,999	999,999	999,999
' Tagihan Penjualan Angsuran	999,999	999,999	999,999	999,999
' Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	999,999	999,999	999,999	999,999
' Kemitraan dengan Pihak Ketiga	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Tak Berwujud	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Tak Berwujud-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Lain-Lain	999,999	999,999	999,999	999,999
' Dana Penjaminan	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Lain-Lain-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
KEWAJIBAN	999,999	999,999	999,999	999,999
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	999,999	999,999	999,999	999,999
Utang Kepada Pihak Ketiga	999,999	999,999	999,999	999,999
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka Dari Raekening Khusus	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka dari BUN	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka dari KPPN	999,999	999,999	999,999	999,999
Pendapatan yang ditangguhkan	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
Cadangan Piutang	999,999	999,999	999,999	999,999
Cadangan Persediaan	999,999	999,999	999,999	999,999
Dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA INVESTASI	999,999	999,999	999,999	999,999
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	999,999	999,999	999,999	999,999
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999

ASET LAINNYA	999,999	999,999	999,999	999,999
' Tagihan Penjualan Angsuran	999,999	999,999	999,999	999,999
' Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	999,999	999,999	999,999	999,999
' Kemitraan dengan Pihak Ketiga	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Tak Berwujud	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Tak Berwujud-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Lain-Lain	999,999	999,999	999,999	999,999
' Dena Penjaminan	999,999	999,999	999,999	999,999
' Aset Lain-Lain-BLU	999,999	999,999	999,999	999,999
KEWAJIBAN	999,999	999,999	999,999	999,999
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	999,999	999,999	999,999	999,999
Utang Kepada Pihak Ketiga	999,999	999,999	999,999	999,999
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka Dari Raekening Khusus	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka dari BUN	999,999	999,999	999,999	999,999
Uang Muka dari KPPN	999,999	999,999	999,999	999,999
Pendapatan yang ditangguhkan	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
Cadangan Piutang	999,999	999,999	999,999	999,999
Cadangan Persediaan	999,999	999,999	999,999	999,999
Dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	999,999	999,999	999,999	999,999
EKUITAS DANA INVESTASI	999,999	999,999	999,999	999,999
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	999,999	999,999	999,999	999,999
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	999,999	999,999	999,999	999,999

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Menurut Ulum (2004:235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sedangkan sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1 Dasar Hukum
 - A.2 Kebijakan Teknis Satuan Kerja
 - A.3 Kebijakan Akuntansi

B. Penejelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

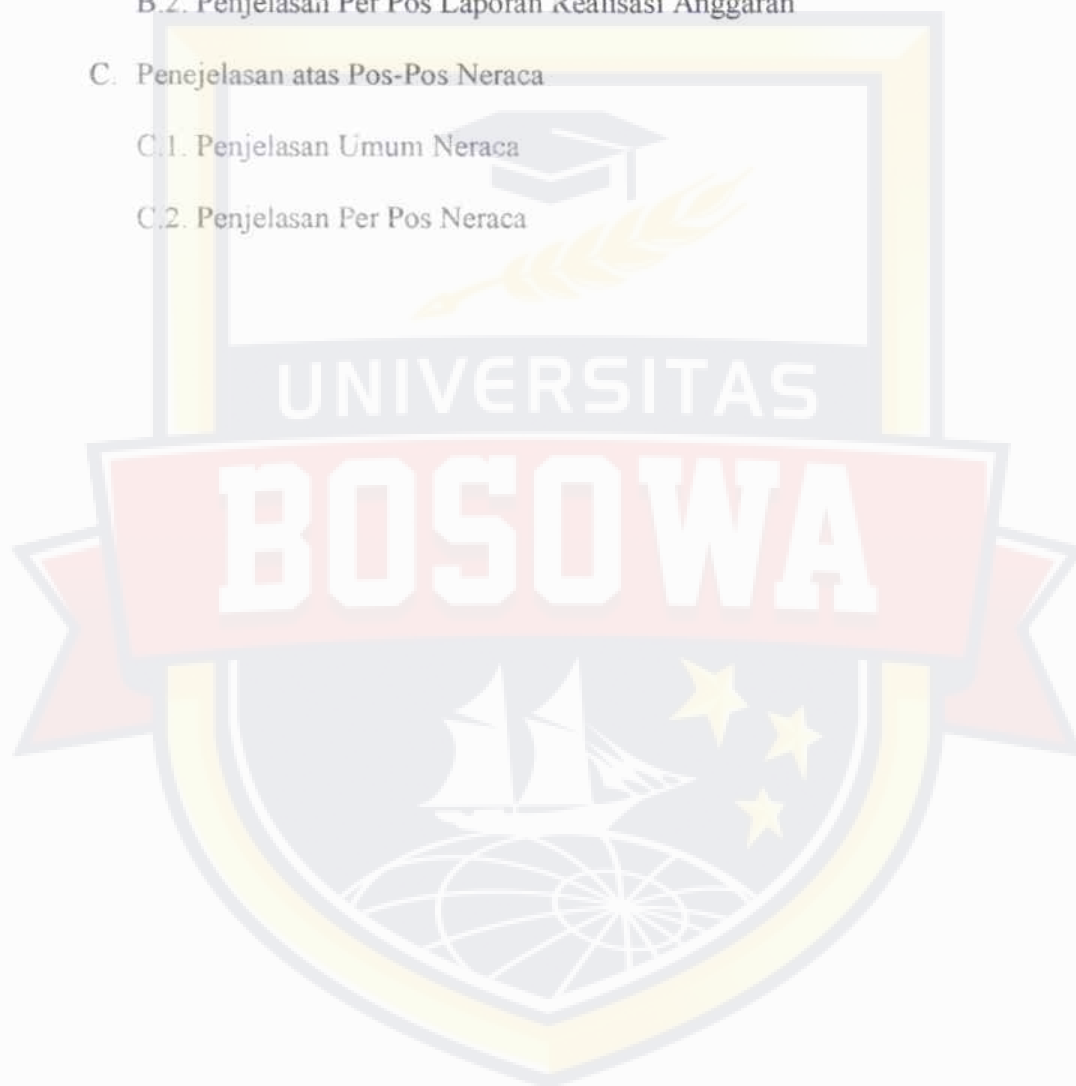
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

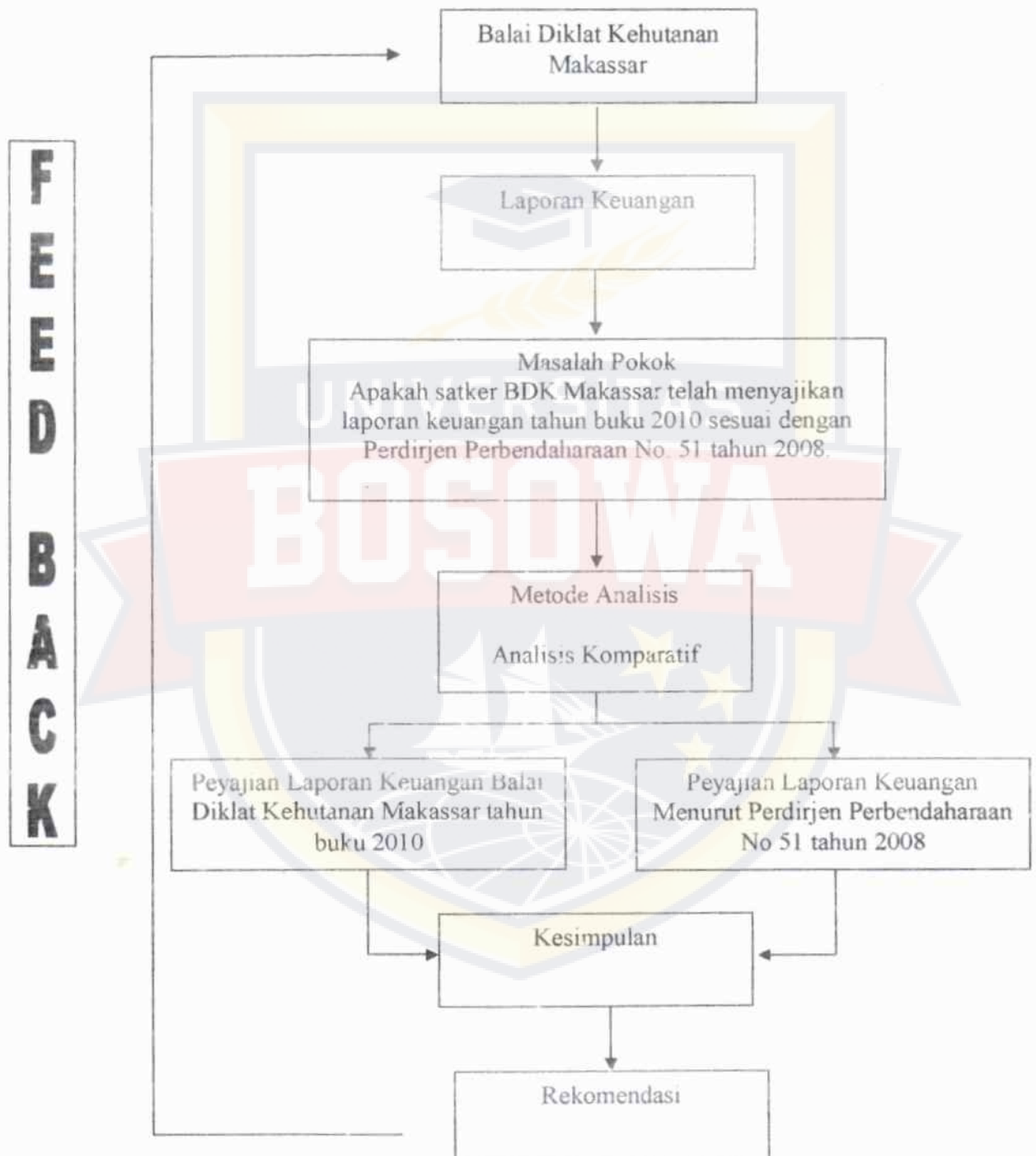
C. Penejelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Penjelasan Umum Neraca

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca



2.2 Kerangka Pikiran



Gambar Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan proposal ini, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 'Diduga bahwa Balai Diklat Keuangan kemungkinan belum optimal menyajikan laporan keuangan per tahun buku 2010 berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No 51 tahun 2008'.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dimulai dari penulisan proposal hingga ujian skripsi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Bulan September sampai dengan Oktober 2012 pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Balai Diklat Kehutanan Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature yang erat kaitannya dengan proposasal ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) meliputi

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dalam kegiatan perusahaan.
- b. Interview yaitu dilakukan jalan wawancarasecara langsung dengan kepala bagian dan sejumlah personil dalam penulisan proposal ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor yang diteliti, misalnya sejarah singkat Balai Diklat Kehutanan Makassar, Struktur Organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan.

3.4 Metode Analisis

Dengan berdasar pada masalah pokok dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijabarkan metode yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya dalam kerangka konseptual adalah menggunakan metode analisis komparatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengemukakan teori-teori atau konsep yang membicarakan tentang pedoman penyajian laporan keuangan, yang kemudian membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

3.5 Definisi Operasional

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

2. Laporan Keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal yang memerlukannya.
3. Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dari anggota atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
4. Perangkat Pendukung lainnya adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *software* yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Balai Diklat Kehutanan Makassar

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi di tingkat pusat, sejak awal tahun 2011 berubah menjadi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai dan non pegawai di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, BDK Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program diklat,
- b. Melaksanakan diklat,
- c. Melaksanakan kerjasama diklat,
- d. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di hutan diklat,
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta
- f. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BDK Makassar memiliki wilayah pelayanan meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah,

Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

4.1.2 Letak Geografis

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jl Perintis Kemerdekaan Km 17,5 sudiang. Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar berjarak kurang lebih 4,72 km dari Bandara Hasanuddin dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu BDK Makassar juga mengelola Kawasan Hutan Diklat sebagai tempat praktek seluas 601,26 ha yang terletak di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang berjarak kurang lebih 52,6 km dari Kantor BDK Makassar dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Diklat oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat Keputusan No. SK 13/MENHUT-II/2010 tanggal 14 Januari 2010.

4.1.3 Visi dan Misi Balai Diklat Kehutanan Makassar

Visi : “Terwujudnya Balai Diklat Kehutanan Makassar yang mampu menyelenggarakan diklat yang bermutu, guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia pembangunan kehutanan yangn professional dan berakhlak mulia”

Misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan kehutanan bagi aparatur kehutanan;
2. Menyelenggarakan program pelatihan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur;
3. Mengembangkan kelembagaan pendidikan dan pelatihan kehutanan.

4.1.4 Struktur Organisasi Balai Diklat Kehutanan Makassar dan Uraian Jabatan

Struktur organisasi merupakan gambaran umum mengenai tugas dan wewenang setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk terwujudnya misi organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka diharapkan tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang-tindih.

Balai Diklat Kehutanan (BDK) Makassar memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas mengontrol/mengawasi kelancaran proses pekerjaan dalam setiap bagian dalam ruang lingkup Balai Diklat Kehutanan Makassar, mengatur dan merencanakan program kerja yang berkenaan dengan usaha peningkatan dan pengembangan Balai Diklat Kehutanan Makassar.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan umum seperti persuratan, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan.

3. Seksi Penyelenggaraan Diklat

Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program dan pengajaran, kegiatan kesiswaan serta kegiatan praktek dan sarana latihan.

4. Seksi Sarana Hutan Pendidikan dan Pelatihan

Kepala seksi sarana hutan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasi pengelolaan hutan diklat dalam rangka mendukung kegiatan pada khususnya dan pengembangan SDM kehutanan pada umumnya.

5. Kelompok Fungsional Widyaiswara

Kelompok fungsional widyaiswara mempunyai tugas mendidik, mengajar atau melatih secara penuh peserta diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah secara berkesinambungan.

4.1.5 Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan Keuangan Balai Diklat Kehutanan Makassar

Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Balai Diklat Makassar terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja menyajikan laporan keuangan serta perangkat pendukung yang akan digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008. Untuk mengoperasikan perangkat pendukung berupa komputer atau laptop dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dibutuhkan sejumlah pegawai dengan kualifikasi khusus yang dapat mengoperasikan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Jumlah pegawai pada Balai Diklat Kehutanan Makassar pada bulan Oktober 2012 sebanyak 91 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



		PNS												Non PNS						Jml											
		Jabatan						Non PNS																							
		Struktural			Fungsional			Guru			Non Struktural			CPNS			Tenaga Honor/Upah														
No	Gol	Pendidikan			Pendidikan			Pendidikan			Pendidikan			Pendidikan			Pendidikan														
		Strata			Strata			Strata			Strata			Strata			Strata														
		S3	S2	S1	D	SLTA	S3	S2	S1	SLTA	S2	S1	D	SLTA	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	S2	S1	SLTA	SLTP	SI	D	SLTA	SLTP	SD		
1.	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	IV/c	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4.	IV/b	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
5.	IV/a	-	-	-	-	-	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
6.	III/d	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
7.	III/c	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
8.	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9.	III/a	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
10.	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
11.	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
12.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
13.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
14.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Jumlah		-	1	3	-	-	1	12	7	1	-	-	1	15	2	20	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	3	92

Sumber: Laporan Bulanan BDK Makassar Bulan Oktober 2012

Dari 51 pegawai non struktural terdapat 4 orang yang telah mengikuti diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Terdapat satu orang yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), selebihnya masih memerlukan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dalam mengoperasikannya.

Perangkat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (*hardware*) berupa unit komputer/laptop. Selain itu juga perangkat lunak (*software*) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), yaitu suatu aplikasi sistem akuntansi yang digunakan oleh para satker yang mendapatkan anggaran dari dana APBN untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, realisasi anggaran belanja dan realisasi pendapatan negara. Laporan tersebut diperlukan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di satuan kerjanya masing-masing.

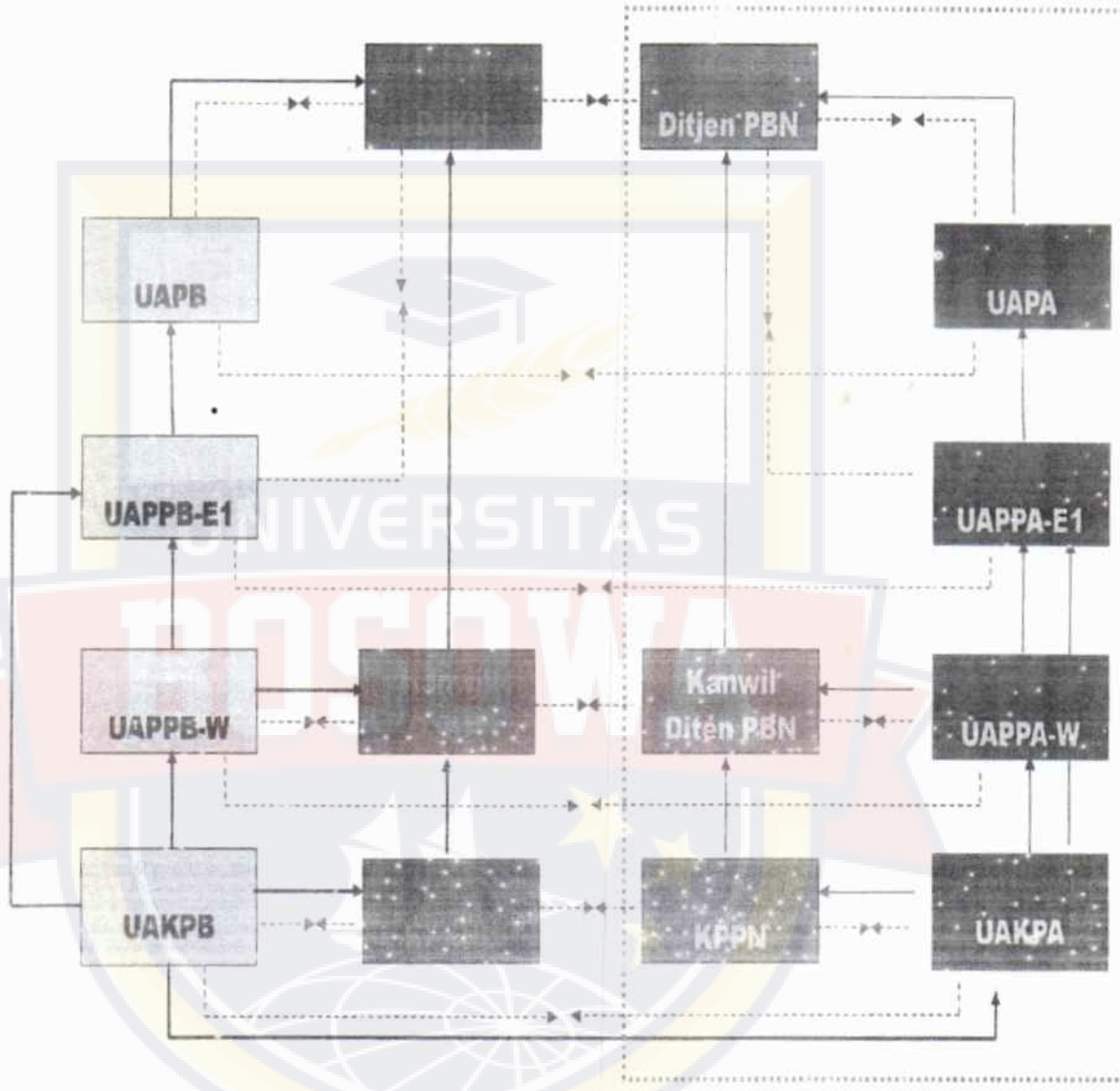
Dari unit komputer dan laptop yang ada hanya 1 unit dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini disebabkan oleh faktor keamanan dari campur tangan berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Untuk penyajian laporan keuangan tahun 2010 Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan masih berada di bawah Lingkup Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Kehutanan dengan kode (029), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Eselon 1 (UAPPA-E1) Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan dengan kode (01), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) adalah BDK sendiri dan kode satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar sendiri adalah 238073.

Dalam pelaksanaannya operator SAKPA melakukan input data keuangan dan melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SIMAK BMN (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara). Setelah itu paling lambat sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya mengadakan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan melaporkannya ke tingkat struktur organisasi di atasnya. Sehingga hasil akhir laporan keuangan dari setiap satuan kerja akan terkumpul dan terbentuk di tingkat kementerian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Bagan Alur SAI

Sumber: diolah dari penulis dari Modul Sistem Informasi dan Akuntansi Manajemen Barang Milik Negara.

Berikut ini akan disajikan Laporan Keuangan Tahun 2010 Balai Diklat Kehutanan

Makassar:

3. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 (DALAM RUPIAH)									
KEMENTERIAN NEGARALAMBAJA			029	DEPARTEMEN KEHUTANAN					
ESKELON I			01	SEKRETARIAT JENDERAL					
WILAYAH PROPINSI			1900.00	PROP. SULAWESI SELATAN					
SATUAN KERJA			238073.00	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
JENIS KEWENANGAN			KID	KEHUTANAN MAKASSAR					
				KANTOR DAERAH					
No	URAIAN	Anggaran	Realisasi	2010		2009		% Realisasi Anggaran	
				Realisasi Di Atas (Barah) Anggaran	% Realisasi Anggaran	Realisasi Di Atas (Barah) Anggaran	% Realisasi Anggaran		
1									
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	0.00	3,245,900	3,245,900	0.00	3,245,900	3,753,300	0.00	
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	3,245,900	3,245,900	0.00	3,245,900	3,753,300	0.00	
A.2	HIBAH	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH									

B	BELANJA	Rupiah Murni	16.824.936.000	15.753.369.060	(1.071.566.940)	93,63	13.033.765.000	12.258.337.609	(775.427.391)	94,05
		Belanja Pegawai	5.358.744.000	5.027.557.126	(327.186.874)	93,89	4.782.892.000	4.519.856.974	(263.035.026)	94,50
		Belanja Barang	6.892.825.000	6.522.946.789	(359.878.211)	94,77	4.847.652.000	4.560.985.655	(286.666.345)	94,09
		Belanja Modal	4.587.367.000	4.207.865.145	(384.501.855)	91,62	3.403.221.000	3.177.494.980	(225.726.020)	93,37
		Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0
B.2	Pembayaran Bunga Utang	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.3	Hibah	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C	JUMLAH BELANJA	Belanja Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA			16.824.936.000	15.753.369.060	(1.071.566.940)	93,63	13.033.765.000	12.258.337.609	(775.427.391)	94,05

C1	PENBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C1.a	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C1.b	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C2.b	Pembayaran Ciptaan Pokok Uang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENBIAYAAN (C1 + C2)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Balai Diklat Kehutanan Makassar tahun 2010

b. Neraca

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ORGANISASI WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA TUGAS KEWENANGAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2010 dan 2009
(DALAM RUPIAH)

DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PROP. SULAWESI SELATAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
MAKASSAR
KANTOR DAERAH
: KD

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	35,808,165	(35,808,165)	(100,00)
Persediaan	4,710,955	6,908,350	(2,197,395)	(31,80)
JUMLAH ASET LANCAR	4,710,955	42,716,515	(38,005,560)	(88,97)

ASET TETAP							
Tanah	39.645.566,000	39.645.566,000	0	0,00			
Peralatan dan Mesin	5.478.966,095	4.720.310,595	758.655,500	16,07			
Gedung dan Bangunan	25.271.956,016	22.121.406,865	3.150.549,145	14,24			
Tanah, Irigasi dan Jaringan	1.954.543,850	1.812.460,300	142.083,550	7,83			
Aset Tetap Lainnya	270.671,200	139.256,750	131.414,450	94,36			
JUMLAH ASET TEATAP	72.621.703,155	68.439.000,510	4.182.702,645	6,11			
JUMLAH ASET	72.626.414,110	68.481.717,025	4.144.697,085	6,05			
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Uang Muka dari KPPN	0	35.808,165	(35.808,165)	(100,00)			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	35.808,165	(35.808,165)	(100,00)			
JUMLAH KEWAJIBAN	0	35.808,165	(35.808,165)	(100,00)			
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Cadangan Persediaan	4.710,955	6.908,350	(2.197,395)	(31,80)			
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	4.710,955	6.908,350	(2.197,395)	(31,80)			
EKUITAS DANA INVESTASI							
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	72.621.703,155	68.439.000,510	4.182.702,645	6,11			
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	72.621.703,155	68.439.000,510	4.182.702,645	6,11			
JUMLAH EKUITAS DANA	72.626.414,110	68.445.908,860	4.180.505,250	6,11			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	72.626.414,110	68.481.717,025	4.144.697,085	6,05			

Sumber : Laporan Keuangan Balai Diklat Kertutanan Makassar tahun 2010

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Diklat Kehutanan Makassar terdiri dari

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER .51 /PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

A.2. Kebijakan Teknis Balai Diklat Kehutanan Makassar

Visi : "Terwujudnya Balai Diklat Kehutanan Makassar yang mampu menyelenggarakan diklat yang bermutu, guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia pembangunan kehutanan yang professional dan berakhlak mulia"

Misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan kehutanan bagi aparatur kehutanan;

2. Menyelenggarakan program pelatihan kehumanan bagi aparatur dan non aparatur;
3. Mengembangkan kelembagaan pendidikan dan pelatihan kehumanan.

A.3. Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Balai Diklat Kewanitaan Makassar adalah:

A.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

A.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

A.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

A.3.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

A.3.3.2 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

A.3.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar

hukun yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.)

A.3.4 . Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A.3.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

A.3.4.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

A.3.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penjelasan Umum Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember TA 2010, yang terdiri dari :

B.1.1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebesar Rp 3.245.900

merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas sebesar Rp 3.245.900.

B.1.2. Realisasi Belanja Negara

Belanja Negara terdiri dari

- Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 15.143.787.210 dari pagu anggaran sebesar Rp 16.184.816.000 atau jika dinilai dengan presentase adalah 93.57%.
- Belanja PNBP sebesar Rp 609.581.850 dari pagu anggaran sebesar Rp 640.120.000 atau jika dinilai dengan presentase adalah 95.23%.

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Negara Balai Diklat Kehutanan Makassar berdasarkan sumber pendanaannya terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 15.143.787.210 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 609.581.859. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.027.547.126; Belanja Barang sebesar Rp 6.522.946.789; dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.202.865.145.

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp 72.626.414.110 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 4.710.955 dan Aset Tetap sebesar Rp 72.621.703.155; Aset Lainnya sebesar Rp 0.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0 merupakan kewajiban jangka pendek berupa uang muka dari KPPN sebesar Rp 0.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 72.626.414.110 terdiri dari ekuitas dana lancar (cadangan persediaan) sebesar Rp. 4.710.955 dan ekuitas dana investasi (diinvestasikan dalam aset tetap) sebesar Rp 72.621.703.155.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0. Merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan secara definitive kepada kas Negara pada tanggal neraca.

C.2.1.2. Persediaan

Jumlah persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4.710.955 dibandingkan kondisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 6.908.350 terjadi penurunan sebesar Rp 2.197.395.

C.2.2. Aset Tetap

C.2.2.1. Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp 39.645.566.000 tidak ada perubahan nilai dibandingkan dengan kondisi tahun lalu.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp 5.478.966.095. Dibandingkan dengan kondisi tahun lalu sebesar Rp 4.720.310.595 ada perubahan penambahan nilai sebesar Rp 758.655.500. Terjadinya kenaikan nilai aset peralatan dan mesin diantaranya pembelian/belanja mesin gerindra, mesin bor tangan, mesin ketam, hand sprayer, alat pengukur curah hujan, lemari besi metal, lemari kayu, filling cabinet besi, CCTV, mesin absensi, LCD Proyektor, kasur/spring bed, AC Split, televisse, GPS receiver, peralatan studio pemetaan, laptop.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 25.271.956.010. Dibandingkan kondisi tahun lalu sebesar Rp 22.121.406.865 ada penambahan nilai aset sebesar Rp 3.150.549.145. Terjadi kenaikan nilai aset gedung dan bangunan diantaranya disebabkan oleh adanya renovasi bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung tempat ibadah permanen, bangunan gedung tempat kerja permanen, bangunan lainnya, bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen dan asrama permanen.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Nilai jalan dan jembatan per 31 Desember 2010 sebesar

Rp 1.006.386.800 tidak ada perubahan dibandingkan per 31 Desember 2009. Irigasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 675.455.050 dibandingkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 533.371.500 (ada kenaikan sebesar Rp 142.083.550); dan jaringan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 272.702.000 tidak ada perubahan dibandingkan per 31 Desember 2009.

Untuk kenaikan aset tetap irigasi diantaranya disebabkan oleh adanya pengembangan bangunan penguat tebing/pantai, bak penyimpanan /tower air baku.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp 270.671.200 dibandingkan dengan kondisi tahun lalu sebesar Rp 139.256.750 ada perubahan sebesar Rp 131.414.450. Kenaikan ini disebabkan diantaranya berasal dari pembelian buku dan alat musik lainnya.

C.2.3 Kewajiban Jangka Pendek

C.2.3.1. Uang Muka dari KPPN

Jumlah uang muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0 dibandingkan kondisi tahun lalu sebesar Rp 35.808.165.

C.2.4. Ekuitas Dana Lancar

C.2.4.1 Cadangan Persediaan

Jumlah cadangan persediaan per 31 Desember 2010 sebesar

Rp 4.710.955 dibandingkan kondisi tahun lalu sebesar Rp 6.908.350 ada penurunan sebesar Rp 2.197.395.

C.2.5. Ekuita Dana Diinvestasikan

C.2.5.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 72.621.703.155 dibandingkan dengan kondisi tahun lalu sebesar Rp 68.439.000.510 ada perubahan kenaikan sebesar Rp 4.182.702.645.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Satker Balai Diklat Kehutanan Makassar

4.3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Secara umum tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

sebelumnya Balai Diklat Kehutanan Makassar pada tahun 2010 juga menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan pada Balai Diklat Kehutanan Makassar telah disajikan secara sistematis meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana (neraca).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Balai Diklat Kehutanan Makassar pada tahun anggaran 2010 secara garis besar sudah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh BPK.
2. Pada tahun anggaran 2010, Balai Diklat Kehutanan Makassar di dalam penyajian laporan keuangan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008.
3. Kebijakan Akuntansi pada Balai Diklat Kehutanan Makassar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan yaitu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
4. Balai Diklat Kehutanan Makassar mempunyai faktor pendukung dan perangkat pendukung yang cukup memadai dalam mewujudkan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008.

5. Faktor pendukung yang dimaksud adalah adanya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dari segi jumlah cukup memadai sehingga bisa saling saling menggantikan apabila terjadi halangan agar tidak timbul kendala keterlambatan dalam penyampaiannya.
6. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perangkat keras (*hardware*) berupa laptop. Dari segi keamanan data cukup terjamin karena penggunaannya hanya menggunakan satu perangkat laptop. Selain itu juga perangkat lunak (*software*) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Aplikasi senantiasa dalam tahap perkembangan dengan adanya update data setiap beberapa periode sekali. Selain itu untuk cadangan data disediakan flashdisk untuk meminimalisir kehilangan data.
7. Dalam hal ketepatan waktu pelaporan Balai Diklat Kehutanan Makassar senantiasa melaporkan dan rekonsiliasi tepat waktu sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008 ditandai dengan salinan bukti rekonsiliasi dengan KPPN yang terdapat pada lampiran.
8. Dari segi penyajian laporan keuangan, Balai Diklat Kehutanan Makassar tidak turut andil dalam terciptanya opini Wajar Dengan Pengecualian oleh Balai Pemeriksa Keuangan, karena sudah sesuai dengan aturan yang ada.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis memberikan saran bahwa Penyajian Laporan Keuangan pada satuan kerja Balai Diklat Kehutanan Makassar sudah mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008, sehingga dalam prakteknya tidak perlu adanya perbaikan yang signifikan dalam hal penyajiannya. Hanya saja dalam hal pemaparan kebijakan teknis dari Balai Diklat Kehutanan Makassar perlu di masukkan rencana strategis Balai Diklat Kehutanan Makassar, bukan hanya penyampaian visi dan misi saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Hartina, Silka. 2009, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kenneth dan Jane. 2005, *SIM: Mengelola Perusahaan Digital*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, -----, Jakarta.
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan. 2008, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, -----, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001, *Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Susilo. 2002, *Audit Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gema Amiri, Jakarta.
- Ulum, Fhyahul MD. 2004, *Akuntansi Sektor public Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar. 2011, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar.
- .2008, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2008, *Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- . 2008, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- . 2008, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta

-----, 2008, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.



Berita Acara Rekonsiliasi

BA-0045/WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan **Februari** tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Satuan **BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073)** disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054) Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran periode Tahun Anggaran 2009 sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja bulan **Januari** TA. 2010
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja bulan **Januari** TA. 2010
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan bulan **Januari** TA. 2009
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan bulan **Januari** TA. 2010
5. Neraca bulan **Januari** Tahun Anggaran 2010.

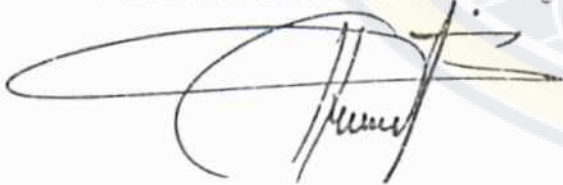
Pada tanggal sepuluh bulan **Februari** tahun **2010**.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri *Laporan Hasil Rekonsiliasi* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

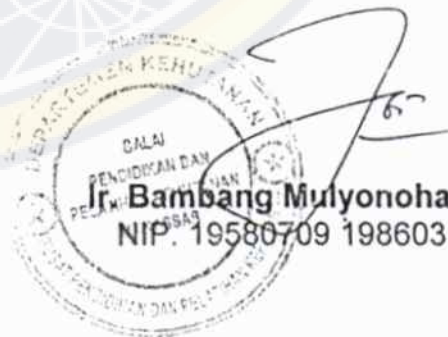
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

Kuasa Pengguna Anggaran



Isulinda Perangin Angin, SE
NIP. 060074318



Ir. Bambang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19580709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA-0187/WPB.25/KP.0140/2010

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah **BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR** (G.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode **Februari** tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode **Februari** tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode **Februari** tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode **Februari** tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode **Februari** 2010.

Pada tanggal empat bulan Maret tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. **DIPA**

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

2. **LRA**

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. **NERACA**

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318

Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Bambang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19590709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 0343/WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Maret tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Maret tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Maret tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Maret tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Maret 2010.

Pada tanggal satu bulan April tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318



Kuasa Pengguna Anggaran

Bambang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19590709 198603 1 001

Pada hari ini **Senin tanggal tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh** telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar (029.01.238073) yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054) yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode April tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode April TA. 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode April TA. 2009
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode April TA. 2010
5. Laporan Neraca periode April Tahun Anggaran 2010.

Pada tanggal tiga bulan Mei Tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang terdapat dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

Kuasa Pengguna Anggaran

Muhvachadi M Si

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sepuluh** telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah **Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar (029.01.238073)** yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar i kode (054) yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode **April** tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode **April** TA. 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode **April** TA. 2009
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode **April** TA. 2010
5. Laporan Neraca periode **April** Tahun Anggaran 2010.

Pada tanggal **tiga** bulan **Mei** Tahun **2010**.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidacocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

Kuasa Pengguna Anggaran



Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 0805 /WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini *dua* tanggal *8* bulan *Juni* tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Mei tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Mei tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Mei tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Mei tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Mei 2010.

Pada tanggal *8* bulan *Juni* tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI.

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318

Kuasa Pengguna Anggaran



Bambang Mulyonohadi, M.S!
Bambang Mulyonohadi, M.S!
NIP. 090709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 10 SD /WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini Selasa tanggal 06 bulan Juli tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Juni tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Juni tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Juni tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Juni tahun anygaran 2010
5. Laporan Neraca periode Juni 2010.

Pada tanggal 06 bulan Juli tahun 2010

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI.
2. LRA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI
3. NERACA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318

Kuasa Pengguna Anggaran

Banbang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19590709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA-142/WPB.25/KP.0140/2010

Pada hari ini *Jumat* tanggal *06* bulan Agustus tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI DIKLAT KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Juli tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Juli tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Juli tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Juli tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Juli 2010.

Pada tanggal *06* bulan Agustus tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidacocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318

Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Bambang Mulyonohadi, MSi
NIP 195807091986031001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA-1307 /WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini tanggal 3 bulan September tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Agustus tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Agustus tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Agustus tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Agustus tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Agustus 2010.

Pada tanggal 3 bulan September tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 060074318

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Bambang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19590709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 1434 /WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Lima* bulan September tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode September tahun anggaran 2010^y
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode September tahun anggaran 2010. ✓
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode September tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode September tahun anggaran 2010. ✓
5. Laporan Neraca periode September 2010.

Pada tanggal *Lima* bulan September tahun 2010

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dari Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI.
2. LRA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI
3. NERACA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI



yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakkcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E

NIP. 198510121985031005

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Seksi Sarana Hutan Diklat,

Adi Suyadi, S.Hut

NIP. 19610810 198703 1 003

Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 1734 /WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar i kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Oktober tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Oktober tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Oktober tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Oktober tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Oktober 2010.

Pada tanggal empat bulan Nopember tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI.
2. LRA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI
3. NERACA
Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 196510121985031005



Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Bambang Mulyonohadi, M.Si
NIP. 19590709 198603 1 001

Berita Acara Rekonsiliasi

BA-1887/WPB.24/KP.0140/2010

Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal 03 bulan 12 Tahun Dua Ribu Sepuluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah **Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar (029.01.238073)** yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054) yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode **November** tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode **November** TA. 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode **November** TA. 2010
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode **November** TA. 2010
5. Laporan Neraca periode **November** Tahun Anggaran 2010.

Pada tanggal 03 bulan Desember Tahun 2010.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara



Kuasa Pengguna Anggaran

Mewakili,

Berita Acara Rekonsiliasi

BA- 140 /WPB.24/KP.0140/2011

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Januari tahun Dua Ribu Sebelas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR (029.01.238073), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I kode (054), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Desember tahun anggaran 2010.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Desember tahun anggaran 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Desember tahun anggaran 2010.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Desember tahun anggaran 2010
5. Laporan Neraca periode Desember 2010.

Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2011.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

1. DIPA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

2. LRA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

3. NERACA

Tidak Terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp.

yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi (BAR) dan hasil Laporan Rekonsiliasi menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Isulinda Perangin Angin, S.E
NIP. 196510121985031005

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Agus Widoyoko, MSc
NIP. 19620817 198703 1 001